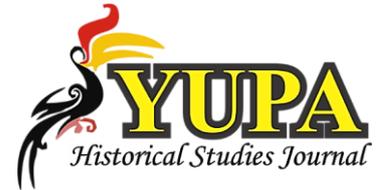


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 4 No. 1, 2020 (40-49)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Siak Masa Revolusi (1945-1949)

Murni Wahyuni¹, Budi Agustono², Warjio³

¹Universitas Sumatera Utara, Pekanbaru, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³ Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹murniwahyun@gmail.com, ²agustono_budi@yahoo.com, ³warjio1974@gmail.com

Received	Accepted	Published
20/07/2020	25/08/2020	10/09/2020

Abstract *The Revolution of Indonesian Independence 1945-1949 was a series of events which were full of heroic movements in order to fight for the sovereignty of the Republic of Indonesia. Siak is one of the regions that has not escaped the wave of the revolution. Sultan Syarif Kasim II played his role in the revolution. This study focuses on the discussion: (1) the Siak transition process towards the Republic, (2) the reason Sultan Syarif Kasim II supported the Republic of Indonesia, (3) the policy of Sultan Syarif Kasim II during the revolutionary period. The method used is a historical method by collecting historical sources relevant to this research. Data is collected through literature studies, interviews and documentation. The results showed that, (1) the sultan showed an anticolonial attitude during his administration (2) The idea of democracy, education and a sense of nationalism were the main reasons. (3) the sultan was involved in the conference of kings in Sumatra Timur.*

Keywords: *Revolution, Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Kasim II, Republic of Indonesia*

Abstrak Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 adalah rangkaian peristiwa yang penuh dengan gerakan heroik demi memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Siak termasuk wilayah yang tidak luput dari gelombang revolusi tersebut. Sultan Syarif Kasim II memainkan perannya dalam revolusi tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan: (1) proses peralihan Siak menuju Republik, (2) alasan Sultan Syarif Kasim II mendukung Republik Indonesia, (3) Kebijakan Sultan Syarif Kasim II pada masa revolusi. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan penelitian ini. data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) sultan menunjukkan sikap antikolonial selama pemerintahannya (2) Ide demokrasi, pendidikan dan rasa nasionalisme menjadi alasan utama dibalik alasan sultan untuk mendukung Republik Indonesia. (3) sultan memberikan dukungan dengan dan ikut terlibat dalam konferensi raja-raja di Sumatera Timur.

Kata kunci: *Revolusi, Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Kasim II, Republik Indonesia*

PENDAHULUAN

Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Syarif Kasim II merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Siak yang memerintah pada tahun 1915-1945 (Ellya, 2010). Menurut Suwardi (2005), Sultan Syarif Kasim II adalah seorang yang antikolonial dan menolak bekerjasama dengan Belanda yang terlalu ikut campur mengenai hal internal istana. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Belanda untuk terus menggerus kekuasaan Sultan pada masa itu, terutama dengan cara menandatangani berbagai kontrak (*treaties*) (Andaya, 1997). Sultan Syarif Kasim II sempat menggunakan Jepang sebagai alat untuk melawan Belanda, namun ini tidak berlangsung lama, karena ternyata Jepang tidak jauh lebih baik dari Belanda. Jepang kemudian menguasai pemerintahan secara struktural di wilayah Siak. Sultan Syarif Kasim II baru tahu kabar kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1945. Hal ini dikarenakan ketatnya pengawasan Jepang terhadap telekomunikasi radio yang menjadi sumber penghubung Riau ke dunia luar, ditambah lagi Jepang saat itu harus mempertahankan *status quo* Indonesia sebagai syarat terhadap sekutu.

Kesultanan Siak tergabung kedalam Keresidenan Sumatera Timur (*Afdeeling* Siak yang meliputi wilayah Kesultanan Siak, Pelalawan, Kampar dan Rokan) yang kemudian dikeluarkan dari Keresidenan ini oleh pemerintah Belanda pada 1 Januari 1941 dan dimasukkan kedalam Residensi Riau (Netscher, 1854). Siak ikut tergabung dalam konferensi yang diadakan oleh Gubernur T.M Hasan yaitu konferensi besar Raja-raja Sumatera Timur. Konferensi ini didorong oleh sikap positif mereka atas pendirian Republik bersama dengan aparat pemerintahan NRI dan Komite Nasional serta partai-partai pada tanggal 3 Februari 1946 di Jalan Sukamulia, Medan. Sultan Langkat bersama raja-raja Sumatera Timur lainnya termasuk Sultan Syarif Kasim II menyatakan mendukung Republik dan mematuhi semua perintah pemerintah Republik serta segera menyusun peraturan pembentukan Dewan Perwakilan rakyat pada tiap Daerah Istimewa (Swapraja) dan mengadakan proses demokratisasi dalam tubuh kerajaan, sesuai dengan tuntutan revolusi Indonesia (Panitia Konferensi Internasional, 1997).

Memilih antara penghapusan kerajaan dengan sistem demokrasi nampaknya juga merupakan pilihan yang cukup sulit pada saat itu. Pendekatan maupun sikap yang diambil mengenai hal ini tentu akan mempengaruhi setiap keputusan tersebut. Pasca pengibaran bendera merah putih pertama kali di Rengat (Ahmad, 2004), setelah sebelumnya masyarakat kesulitan mendapatkan akses informasi terutama dari radio. Sekutu kembali datang untuk mengusik kemerdekaan Indonesia, di wilayah Pekanbaru terjadi peristiwa Mountbatten Hotel, usaha pelucutan senjata tentara Jepang oleh Sekutu. Para tawanan yang menganggap mereka sudah kembali berkuasa, para pemuda yang marah kemudian atas komando Hasan Basri pada 18 November 1945 mengepung dan menyerang hotel tersebut. Perundingan kemudian terjadi dan Sekutu harus meninggalkan wilayah Pekanbaru dalam tempo 15 hari (Yusuf, 2004).

Peristiwa lain yang turut mewarnai revolusi di Siak yaitu *Siak Raad* (Dewan Siak). Ini merupakan strategi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dewan ini dipimpin oleh Abubakar dengan anggotanya Dt. Ahmad dan Dt. Kasim (Pramoedya, 2014). Sultan Syarif Kasim II yang pada saat bersamaan sedang berada di Kutaraja sama sekali tidak mengetahui mengenai pembentukan dewan ini (Ahmad, 2004). Sultan Syarif Kasim II kemudian berpidato dan disiarkan oleh RRI ke rakyat Siak, yang menyatakan bahwa Sultan ingin rakyat memilih untuk merdeka bersama Republik Indonesia. Hal ini didukung oleh kondisi pada masa itu, karena pasca Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, Belanda justru kembali untuk menguasai Indonesia. Atas berbagai pilihan dan kondisi politik pada masa itu, ada banyak hal yang justru menjadi bahan pertimbangan yang mempengaruhi rakyat Siak pada masa itu.

Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apa yang melatarbelakangi sikap Sultan sehingga beliau memutuskan untuk integrasi dengan Indonesia. Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan yang diambil oleh Sultan Syarif Kasim II pada masa revolusi. Peneliti ingin merekonstruksi kembali apa yang terjadi dengan Siak dan apa tindakan ataupun keputusan yang Sultan Syarif Kasim II ambil pada saat Indonesia merdeka, serta mengapa beliau mengambil pilihan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menganalisa proses bergabungnya Siak dengan Republik Indonesia, faktor apa saja yang mendorong Sultan Syarif Kasim II untuk mendukung Republik Indonesia serta kebijakan dari Sultan Syarif Kasim II pada masa revolusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode historis. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau yang lebih dikenal dengan pola-pola (Suparlan, 1985). Menurut Garraghan dalam Abdurrahman (1999), metode historis atau metode sejarah mengandung seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tesis.

Metode sejarah digunakan sesuai dengan karakteristik kajian penelitian yaitu tentang kehidupan masyarakat di masa lampau. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi arsip dan penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan Siak pada masa revolusi tahun 1945-1949. Sesuai dengan kepentingan dalam melakukan penelitian karya ilmiah, dalam prosesnya metode historis ini menggunakan empat tahapan penting, antara lain: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siak Sri Indrapura di bawah Pemerintahan Sultan Syarif Kasim II

Sultan Syarif Kasim II, putra dari Sultan Syarif Hasyim dan Tengku Yuk, lahir 11 Jumadil Akhir 1310 H atau 1 Desember 1893 M di Siak Sri Indrapura. Saat mulai beranjak dewasa, beliau dikirim ke Batavia untuk menempuh pendidikan di *Instituut Beck en Volten* (Tim Media Pusindo, 2008). Pada tanggal 3 Maret 1915, beliau dinobatkan sebagai Sultan Siak XII dengan gelar Sultan yang dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya. Beliau tidak memiliki putera mahkota untuk meneruskan keturunan dan kerajaannya.

Sultan Syarif Kasim II hidup dalam lingkungan keluarga yang mengharuskan beliau untuk ditempa sebagai pemimpin rakyatnya kelak. Melihat ke belakang, kebesaran kejayaan Kesultanan Siak, memaksa beliau untuk bisa memperjuangkan rakyatnya, agar tidak terjadi lagi kontrak politik yang merugikan kesultanan seperti yang sudah berlalu sebelumnya. Berbagai perjanjian di masa lalu inilah yang membuat Sultan Syarif Kasim II dalam posisi yang lemah. Disatu sisi tidak mungkin melakukan perlawanan yang frontal karena terbelenggu perjanjian tersebut yang sudah ada bahkan sebelum beliau lahir. Hal tersebut turut membentuk sikap Sultan Syarif Kasim II, mulai dari bertindak dan berpikir. Kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh buyut beliau justru menjadi alasan kuat untuk melepaskan diri dari cengkeraman Belanda. Secara garis besar, hal-hal inilah yang menjadi dasar sikap antipati beliau terhadap Belanda yang selama ini dikenal sebagai "Sultan Republikan".

Sedikit banyaknya, cara yang Sultan Syarif Kasim II lakukan untuk terus melawan Belanda adalah dengan memajukan pendidikan dan sedikit mengenai militer sebagai bentuk perlindungan dan berjaga-jaga apabila terjadi konfrontasi dengan Belanda. Sepanjang hidupnya, beliau mencoba menanamkan pendidikan di Siak. Melalui pendidikan, rakyat diharapkan mampu lebih pintar dan mendapatkan ilmu serta pemahaman mengenai segala hal dalam bidang pendidikan, agar tidak selamanya terbelenggu dalam kebodohan dan penjajahan. Untuk mengejar berbagai ketertinggalan yang dialami rakyat Siak, beliau membangun sekolah sebagai sarana edukasi bagi rakyat Siak, diantaranya: 1) HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) adalah HIS pertama di Riau, 2) *Latifah School* adalah sekolah khusus putri pertama di Riau, 3) Madrasah Taufiqiyah Al-Hasimiyah adalah sekolah khusus putra dan 4) Madrasah An-Nisa' adalah sekolah khusus putri (Muhammad, 2012).

Siak Bergabung dengan Republik Indonesia

Sejarah Riau mencatat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah diterima oleh Sultan Siak. Tetapi berita itu belum resmi. Untuk itu, dikirim utusan yaitu O.K.M. Djamil ke Pekanbaru bulan Oktober 1945. Setelah diterima berita resmi, maka pada tanggal 28 November

1945 Sultan Siak Sri Indrapura mengirim telegram kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno yang isinya menyatakan kesetiannya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berdiri di belakang Bung Karno dan Bung Hatta. Sikap ini diterima dengan sangat baik oleh rakyat Siak. Tidak ada pertentangan yang datang. Rakyat Siak justru mendukung keputusan pemimpin mereka. Suatu hal yang patut diapresiasi.

Sikap Sultan Syarif Kasim II pada masa itu lebih condong ke arah untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, sehingga pilihan Republik Indonesia adalah hal yang paling sesuai untuk diambil pada saat itu, daripada kembali ke dalam belenggu penjajahan, lebih baik mengorbankan segalanya demi Republik Indonesia. Keputusan yang sebenarnya berat dan menguras mental ini adalah keputusan yang cukup baik untuk diambil pada saat itu, melihat situasi dan kondisi politiknya. Pengorbanan Sultan Syarif Kasim II bukan hanya pengorbanan moral tapi juga materil demi menghilangkan kolonialisme di tanah Siak (Edyanus, 2001).

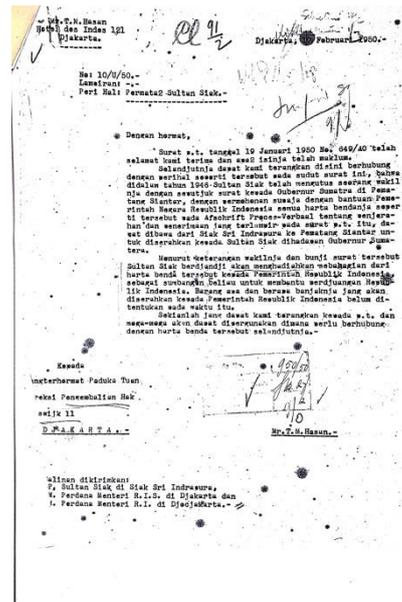
Dengan telah dikibarkannya Sang Merah Putih, maka terpikul tanggung jawab di bahu rakyat, terutama para pemuda untuk membela tanah air yang telah diproklamirkan. Dengan demikian, perjuangan tidak lagi dapat dilakukan sendiri-sendiri, tidak terorganisasi. Segala sesuatunya harus ada yang memberi komando dan yang menjalankan komado. Sultan kemudian membentuk KNI. Kemudian dibentuk pula Tentara Kesatuan Rakyat (TKR). Para pemuda yang telah mendapatkan latihan militer kemudian bergabung dalam barisan Pemuda Republik Indonesia (PRI).

Diplomasi untuk Mempertahankan Indonesia

Tahun 1946, Sultan Syarif Kasim II berangkat meninggalkan Siak menuju Medan dalam pertemuannya dengan Gubernur Sumatera, T.M. Hasan, untuk membicarakan perihal penyerahan kekuasaannya ke pemerintah Republik Indonesia. Sri Sultan Siak Sri Indrapura dalam upacara di istana berikrar akan sehidup semati bersama rakyatnya untuk kepentingan Republik Indonesia (GN-PPNK, 2006). Permaisuri meletakkan tanda merah putih dilengan Sultan sebagai lambang Tentara Keamanan Rakyat. Sultan menyumbangkan uang 20.000 Rupiah untuk keperluan perjuangan NRI dan berjanji selanjutnya, jika negara menghendaki, akan menjual semua harta istana untuk keperluan perjuangan Republik Indonesia. Berdasarkan surat dari Mr. T.M. Hasan, dengan tanggal 19 Januari 1950 No. 649/AO perihal Permata-permata Sultan Siak. Isinya tentang penyerahan sejumlah harta yang dibawa oleh Sultan Siak ke Pematang Siantar untuk diserahkan kepada Gubernur T.M. Hasan. Sultan Siak berjanji akan menghadiahkan sebahagian dari harta benda tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia, sebagai sumbangan beliau untuk membantu perjuangan Republik Indonesia.



Gambar 1. Foto Sultan Syarif Kasim II bersama Isteri Bertemu Bung Karno
Sumber: Arsip Nasional RI



Gambar 2. Surat No. 10/U/50 tertanggal Djakarta, 17 Februari 1950, perihal permata-permata Sultan Siak
Sumber: Arsip Nasional RI

Dari Medan, Sultan Syarif Kasim II kemudian berangkat ke Aceh. Karena beliau dikenal sebagai sultan yang mendukung RI bahkan memberikan bantuan yang besar pula, beliau mendapat perlindungan dari pihak aparat pemerintah RI di sana. Istana Siak yang beliau tinggalkan dan serahkan kepada Pemerintah RI dijadikan markas dan salah satu pusat kegiatan tentara RI. Sedangkan aparat kerajaan, sebagian besar menjadi pegawai RI. Jasa lain yang tercatat dalam sejarah bangsa adalah pernyataan penyerahan kerajaan Siak yang melebur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diiringi dengan penyerahan sumbangan beliau untuk perjuangan kemerdekaan RI melawan Belanda. Sultan menyerahkan semua hartanya kepada Republik Indonesia termasuk Istana Asserayah Hasyimiyah beserta tanah dan lainnya.

Sejak menyatakan integrasinya dengan Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II pergi ke pertemuan raja-raja Sumatera Timur membahas mengenai keadaan selanjutnya di sana. Beliau juga turut menghimbau raja-raja lain agar berintegrasi dengan Republik Indonesia. Para sultan di wilayah Sumatera Timur tidak bisa mempertahankan kedudukannya masing-masing akibat tekanan yang mereka terima pasca Sultan Syarif Kasim II memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Usaha-usaha pemerintah Republik Indonesia untuk membujuk kerajaan-kerajaan supaya bekerjasama dan mendirikan suatu pemerintahan Republik yang efektif dan berkesan tidak lagi diterima dengan simpati oleh pemuda-pemuda Indonesia yang telah sadar tentang kekuatan mereka dan kelemahan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur. Walaupun Gubernur Mr. Hasan tidak mau menggantikan orang kerajaan yang dilantik dalam pemerintahan Republik, didapati bahwa KNI-KNI tempatan telah melantik orang-orang mereka yang telah mengambil

alih kuasa pegawai-pegawai kerajaan (Ariffin, 1999). Hal inilah yang nantinya akan menjadi salah satu alasan pecahnya Revolusi Sosial di Sumatera Timur.

Pecahnya Revolusi Sosial di Sumatera Timur

Sewaktu Sultan Syarif Kasim II sedang berada di Medan, Revolusi Sosial di Sumatera Timur pecah, yang menjadi sasaran revolusi sosial itu adalah kaum bangsawan (para sultan dan keluarganya) (Suwardi, 2005). Belanda dapat menduduki Medan, ibukota Provinsi Sumatera dipindahkan ke Pematang Siantar dan Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hassan juga ikut pindah begitu juga dengan Sultan Syarif Kasim II dan keluarga ikut pindah ke Pematang Siantar.

Negara Sumatra Timur didirikan oleh Belanda untuk mempertahankan daerah kaya minyak, perkebunan tembakau dan karet. Bagi Belanda, hasil perkebunan karet dan minyak sangat penting dalam usaha penjajahan wilayah Indonesia saat itu (Andika, 2016). Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan antifeodalisme, anti dengan sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan. Revolusi melibatkan mobilisasi rakyat yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga Kesultanan Melayu, yang dikenal pro-Belanda namun juga golongan menengah pro-Republik dan pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia (George, 2003). Para sultan pada masa itu masih belum mengakui eksistensi Republik Indonesia, padahal Gubernur T.M. Hasan mencoba merangkul mereka dengan menawarkan posisi istimewa sebagai balasan atas dukungan mereka kepada Republik Indonesia. Namun, para pemuda telah kehilangan kepercayaan pada pihak kesultanan dan pecahlah Revolusi Sosial pada maret 1946.

Kedudukan Sultan Syarif Kasim II di Sumatera Timur bertambah sulit setelah Revolusi Sosial, meskipun sultan setia kepada Republik Indonesia namun masih ada golongan barisan rakyat tertentu yang bermaksud menculik sultan bersama intan berliannya yang cukup banyak. Gubernur Militer memerintahkan Batalyon Divisi Rencong (Divisi Rencong adalah lasykar rakyat yang terkuat di Aceh) di bawah pimpinan Syarif Kasim II bersama keluarganya serta membawanya ke Tanah Aceh (Tim Penulis Sejarah Kerajaan Siak, 2010). Wilayah Aceh adalah satu-satunya wilayah RI yang tidak pernah diduduki oleh tentara Belanda.

Berdasarkan Konstitusi Kerajaan Siak, apabila sultan tidak dapat menjalankan pemerintahan, maka pemerintahan akan dijalankan oleh suatu Dewan Sultan (*Sultan Raad*). Karena Sultan Syarif Kasim II hijrah ke Kotaraja, Aceh, maka dibentuklah Dewan Sultan (*Sultan Raad*) dan Dewan Rakyat Siak (*Siak Raad*) oleh Belanda. GTBA Mr. GJA Veling di Bengkalis berharap dapat menguasai seluruh Kerajaan Siak dengan membentuk dewan-dewan tersebut (Tim Universitas Riau, 2006). Belanda mengaktifkan kembali pemerintahan sultan dengan maksud meminjam pengaruh dan wibawa sultan untuk menguasai rakyat.

Anggota *Siak Raad* tidak tetap pendirian memilih antara federal atau republik. Hal ini semakin menegaskan adanya campur tangan Belanda untuk kembali mencampuri urusan internal Kesultanan Siak Sri Indrapura. *Siak Raad* hampir menjadi alasan terjadinya “Revolusi Sosial di Siak” yang tentu saja akan merugikan banyak pihak akibat sikap “plin-plan” yang diambil oleh pihak anggota dewan ini.

Dalam sidangnya, *Siak Raad* pernah mengeluarkan suatu resolusi yang menuntut daerah istimewa dalam lingkungan Republik Indonesia. Hal ini sangat mengejutkan Belanda. Namun demikian, *Siak Raad* tetap akan melaksanakan resolusi tersebut. Maka kemudian dibentuk delegasi untuk menghadap pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, yang terdiri atas Dt. Wan Entol, Dt. Ahmad, Mas Slamet, dan Penghulu Umar. Delegasi ini berangkat setelah terjadi *cease fire* antara Belanda dengan Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia telah dipulihkan kembali ke Yogyakarta pada bulan Desember 1949. Di Siak, taktik mengajak kaum bangsawan berjuang di pihak Republik Indonesia berhasil berkat keuletan Dt. Wan Abdur Rachman dan H. Muhammad.

Sultan Syarif Kasim II yang pada saat bersamaan sedang berada di Kutaraja sama sekali tidak mengetahui mengenai pembentukan dewan ini. Beliau kemudian berpidato dan disiarkan oleh RRI ke rakyat Siak, yang menyatakan bahwa Sultan ingin rakyat memilih untuk merdeka bersama Republik Indonesia. Sultan Syarif Kasim II menyerukan agar rakyat terus berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan RI dan beliau tidak mengakui dan tidak tau menahu adanya “*Siak Raad*”, karena itu rakyat harus hati-hati dan waspada terhadap tipu daya Belanda.

Pidato radio Sultan Syarif Kasim tersebut telah memberikan dorongan kepada rakyat Siak, terutama kepada tokoh-tokoh yang duduk di dalam “*Siak Raad*”. Dalam sidang paripurna yang diadakan oleh Belanda di Bengkalis, hasilnya sungguh mengecewakan Belanda, karena keputusan yang diambil *Siak Raad* tersebut adalah sebagai berikut (Suwardi, 2005):

1. Tidak mengakui dan tidak mendukung Datuk Kasim Aris sebagai utusan Siak pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
2. Memutuskan bahwa seluruh wilayah kerajaan Siak menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Untuk itu mengirimkan utusan ke Yogyakarta yang terdiri dari Datuk Wan Entol, Datuk Ahmad dan Mas Slamet, menyampaikan keputusan tersebut kepada Pemerintahan Republik Indonesia yang sudah kembali ke Yogyakarta.

Keputusan *Siak Raad* ini memang sangat bersejarah, karena terang-terangan di depan hidung dan di bawah tekanan Belanda. Keputusan yang telah memukul kebijakan Belanda dengan telak. Dengan semangat rakyat yang tetap republiken, maka pembentukan *Siak Raad* tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan Belanda. Ditambah pula dengan adanya pidato-pidato radio Sultan Siak Syarif Kasim melalui RRI Kotaraja yang menyerukan agar pemimpin-pemimpin dan seluruh rakyat Kerajaan Siak tetap menegakkan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pemerintahan Sultan Syarif Kasim II (1915-1946) akan tetap dikenang oleh rakyatnya sebagai sultan yang telah memajukan pendidikan dan pembaruan pemerintahan. Sultan Syarif Kasim II adalah tokoh penting yang paling berpengaruh, tentu saja karena beliau memang seorang sultan yang memimpin pada saat itu, disaat para sultan masih menimbang-nimbang tindakan apa yang harus dilakukan apakah ikut dalam revolusi besar-besaran ini atau justru melewatkannya dengan segala resiko yang mungkin terjadi. Peneliti tegaskan, tidak ada Revolusi Sosial yang terjadi di Siak Sri Indrapura, tidak seperti wilayah lain di Sumatera Timur.

Melihat kebelakang kebesaran kejayaan Kesultanan Siak, memaksa beliau untuk bisa memperjuangkan rakyatnya, agar tidak terjadi lagi kontrak politik yang merugikan Kesultanan seperti yang sudah berlalu sebelumnya. Berbagai perjanjian di masa lalu inilah yang membuat Sultan Syarif Kasim II dalam posisi yang lemah. Disatu sisi tidak mungkin melakukan perlawanan yang frontal karena terbelenggu perjanjian tersebut yang sudah ada bahkan sebelum beliau lahir.

Pendidikan dan rasa Nasionalisme kurang lebih dapat menjadi alasan keinginan integrasi dengan Republik Indonesia. Berkembangnya organisai-organisasi pergerakan pada saat itu, turut ikut andil dalam pembentukan sikap Sultan Syarif Kasim II menjadi seorang yang nasionalis. Beliau yang belajar di Batavia, juga menerima pembaharuan-pembaharuan yang dilancarkan oleh kaum pergerakan pada masa itu. Sepanjang hidupnya, beliau mencoba menanamkan pendidikan di Siak, melalui pendidikan, rakyat diharapkan mampu lebih pintar dan mendapatkan ilmu serta pemahaman mengenai segala hal dalam bidang pendidikan, agar tidak selama terbelenggu dalam kebodohan dan penjajahan.

Siak Raad hampir menjadi alasan untuk terjadinya “Revolusi Sosial di Siak” yang tentu saja akan merugikan banyak pihak akibat sikap “plin-plan” yang diambil oleh pihak anggota dewan ini. Namun, Sultan Syarif Kasim II memutuskan bahwa seluruh wilayah Kerajaan Siak menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad, Y. (2004). *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-2002*. Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Povinsi Riau.
- Andika, B. (2016). KONSTRUKSI MELAYU SAAT REVOLUSI SOSIAL SUMATERA TIMUR DI KESULTANAN LANGKAT DALAM SURAT KABAR (Analisis Framing tentang Konstruksi Melayu Saat Revolusi Sosial Sumatera Timur di Kesultanan Langkat dalam Surat Kabar Pandji Ra'jat). *Jurnal Ilmu Komunikasi Flow*, 2(13).
- Ariffin, S. M. O. (1989). *Bangsa Melayu: Concepts of Democracy and Community among the Malays, 1945-1950* [Disertasi]. Canberra: Australian National University.

- B. Andaya, W. (1997). *Recreating a vision; Daratan and Kepulauan in historical context*. In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Riau in transition* 153, no: 4, Leiden, 483508.
- Edyanus, H. H. (2001). *Mengapa Harus Merdeka? Tangis dan Darah rakyat Riau dalam Memperjuangkan sebuah Marwah*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Ellya, R. (2010). *Penyerahan Sumbangan Kerajaan Siak kepada Pemerintah RI di Gedung Agung Yogyakarta*. Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pekanbaru.
- GN-PPNK. (2006). *Riwayat Hidup Singkat dan Perjuangan Almarhum Sultan Syarif Kasim II*. Jakarta: Departemen Sosial, Rektorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
- George, M. K. (2003). *Nationalism and revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Muhammad, H. (2012). *Pendidikan Di Kerajaan Siak Sri Indrapura: Telaah Historis Pendidikan Di Era Sultan Syarif Kasim II* [Tesis]. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Netscher, E. (1854). *Beschrijving van een Gedeelte der Residentie Riouw*. Tijdschrift voor Indische Taal-Land- en, Volkenkunde.
- Panitia Konferensi Internasional. (1997). *Denyut Nadi Revolusi Indonesia: Revolusi Nasional: Kajian, Kenangan dan Renungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pramoedya, A. T. (2014). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V (1949)*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Suparlan, P. (1985). *Pengantar Metode Penelitan Kualitatif*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Suwardi, M. S. (2005). *Sultan Syarif Kasim II: Pahlawan Nasional dari Riau*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Tim Media Pusindo. (2008). *Pahlawan Indonesia*. Depok: Media Pusindo.
- Tim Universitas Riau. (2006). *Sejarah Perjuangan Riau*. Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa.